



Pemkab Banyumas menyerahkan kembali 137 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) kepada Rektor setelah mereka diterjunkan sebagai sukarelawan Covid-19 selama satu bulan. Penyerahan kembali itu dilakukan secara simbolis oleh Bupati Ahmad Husein kepada Rektor UMP Dr Jebul Suroso di halaman Rumah Karantina (RK) Pondok Slamet Baturraden, Minggu (15/8). Dalam gambar Bupati Banyumas (dua dari kanan) dan Rektor UMP (kanan saat menyimak penjelasan terkait inovasi bilik anosmia.

KR-Antara/Sumarwoto

TUMBUHKAN RASA NASIONALISME

Tri Pusat Pendidikan Berperan Penting

YOGYA (KR) - Peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI di tengah pandemi Covid-19 tak boleh menyurutkan semangat dalam berkarya dan berprestasi. Untuk mewujudkan hal itu keberadaan tri pusat pendidikan tetap memiliki peran dalam menanamkan rasa nasionalisme di lingkungan masing masing, baik pendidikan informal, formal di sekolah dan non formal, semua berkolaborasi membawa nuansa perjuangan NKRI.

"Pandemi mengakibatkan banyak perubahan di berbagai sektor kehidupan. Termasuk pembelajaran di sekolah yang sampai saat ini masih secara daring. Menyikapi kondisi tersebut semua pihak termasuk tri pusat pendidikan harus berupaya memberikan motivasi dan menumbuhkan nasionalisme di kalangan generasi muda, sehingga dalam HUT ke-76 Kemerdekaan anak muncul semangat

untuk lebih berprestasi," kata pengamat pendidikan, Ahmad Zainal Fanani SPd MA di, Minggu (15/8).

Zainal Fanani mengatakan, penanaman nasionalisme di kalangan anak bisa diawali dari hal-hal sederhana yang ada di lingkungan sekitar. Dengan cara itu, selain siswa merasa nyaman, juga tidak terbebani. Misalnya, saat pembelajaran daring, guru bisa meminta anak SD bercerita

sesuai imajinasi mereka tentang perjuangan para tokoh pahlawan. Sedangkan siswa SMP bisa diminta membuat poster pahlawan kemerdekaan atau membuat film pendek tentang perjuangan.

Sementara bagi siswa SMA/SMK atau sederajat bisa diberi tugas membuat naskah drama singkat bagaimana tokoh lokal atau tokoh nasional dalam meraih kemerdekaan. Perjuangan itu tak hanya mengangkat senjata, tapi melalui persidangan, rapat dan diplomasi.

Semua lapisan masyarakat mulai dari ulama, tokoh agama, petani, pedagang pegawai dan seluruh unsur, ujanjnya, mempunyai peran dalam mengisi kemerdekaan. Karena untuk mengisi kemerdekaan membutuhkan sikap proaktif dari seluruh elemen masyarakat. **(Ria)-f**

MAHASISWA HARUS TAHU

Urus Izin Usaha Secara Legal

YOGYA (KR) - *One Single Online* (OSO), merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola lembaga Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal/BPKM. Mahasiswa yang merintis dunia usaha harus tahu alur mengurus perizinan secara legal. Sebab, legalitas usaha itu sangat penting, baik dari perspektif pemerintah maupun hukum dan sesuatu yang legal itu menjual.

Demikian diungkapkan Konsultan PLUT Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) DIY, Wahyu Tri Atmojo dalam Webinar yang diadakan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UAD, Sabtu (14/8). Kegiatan ini merupakan implementasi Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM).

Webinar yang mengambil tema 'Yang Legal, Yang Menjual' Pentingnya Legalitas Usaha dan Perspektif Pemerintah, Hukum dan Pelaku Usaha ini, juga menghadirkan Herdiana Dewi Utari SSI (Ketua Komtap Organisasi DPC Ikatan

Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Bantul Gerdiana Dewi Utari SSI dan Notaris PPAT, Deasy Widya Sari SH dengan moderator Rizky Maulana SE.

Sementara menurut Deasy Widya Sari, kegiatan berusaha bagi pelaku usaha harus memiliki cara pandang maju bersama, bukan bersama-sama mencari bantuan. Hal senada juga disampaikan Herdiana Dewi Putri yang menyebutkan, legalitas harus dimiliki pelaku usaha UMK, seperti Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (IUMKM), Izin Usaha Industri, merk, Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) dan halal.

"Adanya Online Single Submission ini mengurangi kekhawatiran tentang rumit dan lamanya pengurusan izin usaha," ucapnya.

Sedangkan Sumaryanto SEMSi Ak CA, Kaprodi Akuntansi FEB-UAD sekaligus Ketua Pelaksana hibah PKKM mengatakan, kegiatan PKKM salah satunya meningkatkan pemahaman mengenai legalitas usaha. **(Jay)-f**

SOROTI KEBIJAKAN PENILAI PERTANAHAN

Pengasuh Ponpes Umul Albab Raih Doktor

YOGYA (KR) - Pengasuh Ponpes Ulul Alba Balirejo Umbulharjo, KH Ahmad Yubaidi sukses menjalani Ujian Terbuka Promosi Doktor Bidang Studi Islam pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di kampus setempat, Jumat (13/8). Ujian Terbuka ini dipimpin Prof Dr H Machasin MA, selaku ketua sidang didampingi Prof Dr H Abdul Mustaqim SAg MAg, (sekretaris sidang).

Sebagai penguji Prof Dr H Makhrus Munajat SH M Hum (promotor dan penguji I), Dr H Riyanta MHum (copromotor dan penguji II), Dr Ahmad Bahie SH MHum (penguji III), Prof Drs H Ratno Lukito MA DCL (penguji IV), H Bayu Dardias Kurniadi SIP MA MPubPolPh.D (penguji V dari UGM) dan Dr Hj Siti Fatimah SH M Hum (penguji VI). Atas disertasi yang dipaparkan, KH Ahmad Yubaidi, dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.

Di hadapan penguji, promotor dan tamu undangan yang hadir melalui zoom, Doktor ke-773 UIN Suka ini



KR-Istimewa

Dr KH Ahmad Yubaidi

memaparkan hasil penelitian dalam disertasinya yang berjudul 'Kebijakan Penilai Pertanahan Dalam Peralihan Alih Fungsi Tanah untuk Kepentingan Umum'. Judul ini diangkat, karena pria yang sehari-hari berprofesi sebagai notaris dan dosen ini menilai, salah satu permasalahan mengenai alih fungsi tanah untuk kepentingan umum adalah terkait besaran ganti kerugian yang diterima masyarakat dinilai tidak mencerminkan kelayak-

an dan keadilan.

"Salah satu permasalahan mengenai alih fungsi tanah untuk kepentingan umum yaitu terkait besaran ganti kerugian, di mana ganti kerugian yang diterima masyarakat tidak mencerminkan kelayakan dan keadilan. Padahal, UU No 2 Tahun 2012 agar pelepasan hak yang dilakukan masyarakat harus dibarengi pemberian ganti kerugian yang layak dan adil," jelas mantan Ketua PCNU Kota Yogya ini.

Ahmad Yubaidi menjelaskan, dalam perjalanan sejarah, pada tahun 1961 terdapat penaksir tanah dari panitia alih fungsi tanah, sehingga nilai yang dihasilkan tidak objektif dan menimbulkan berbagai permasalahan. Kemudian, pada tahun 2005 dikeluarkan Perpres No 36 Tahun 2005 yang memberi wewenang kepada penilai pertanahan untuk menilai NJOP saja, tetapi untuk bangunan, tanaman, dinilai di atas nilai pasar, sehingga dihasilkan nilai yang lebih tinggi dari nilai pasar yang mengakibatkan masyarakat tidak mau melepaskan tanahnya. **(Fie)-f**

EKONOMI

MMKSI Promo Penjualan L300

YOGYA (KR) - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) selalu mempersiapkan program penjualan atraktif. Untuk konsumen area Jawa Barat dan Jawa Tengah, MMKSI mempersembahkan program penjualan khusus untuk model kendaraan niaga ringan L300.

Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI Irwan Kuncoro menerangkan, program penjualan L300 hadir dengan komitmen serta prioritas untuk tetap dan selalu memberikan kemudahan dan kepuasan kepada konsumen setianya. Program tersebut antara lain, pembiayaan menarik dari Dipostar Finance, cashback Rp 5.000.000 khusus pembelian tunai serta hadiah langsung LED TV. "Beragam penawaran serta layanan yang kami hadirkan pastinya mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan konsumen di masing-masing area," terangnya, Minggu (15/8).

Kemudahan lainnya, baik dari sisi penjualan maupun purna jual juga semakin melengkapi ragam penawaran ini. Menurut Irwan, meski di masa rentan seperti saat ini, pihaknya memberikan kemudahan dengan penyesuaian penawaran dan sistem layanan sehingga konsumen dapat merasakan keuntungan maksimal dan aman. "Mitsubishi L300 merupakan kendaraan niaga ringan andalan Mitsubishi Motors yang telah menemani konsumen Indonesia menjalankan bisnisnya. Seluruh superioritas model ini juga telah terbukti dengan capaian L300 yang telah memimpin pasar kendaraan small pick-up selama empat dekade di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Prestasi tersebut semakin membuktikan bahwa produk ini memenuhi kebutuhan dan juga harapan para konsumen," tandas Irwan. **(Sal)**

BCA Kembangkan CS Digital

JAKARTA (KR) - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) terus berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi nasabah setianya melalui digitalisasi perbankan yang optimal. Salah satu inovasi BCA adalah dengan mengembangkan konsep model cabang masa mendatang yang lebih efisien dengan teknologi dan mesin-mesin digital.

"Terima kasih atas kepercayaan dan apresiasi nasabah yang diberikan kepada BCA dalam memberikan layanan perbankan digital. Kami bersyukur bahwa mesin CS Digital ini dapat memberikan nilai tambah dan manfaat jangka panjang, terkhusus di masa pandemi saat ini yang mendorong nasabah untuk melakukan transaksi perbankan secara lebih mudah, praktis, dan aman," kata Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F Hary di Jakarta, Sabtu, (14/8).

Dikatakan, mesin CS Digital BCA dengan fitur ganti kartu ATM menggunakan KTP elektronik sudah bisa dilakukan sejak April 2019. Hingga saat ini, BCA memiliki hampir 1.200 mesin CS Digital BCA yang tersebar di berbagai lokasi. Nasabah dapat melakukan beragam transaksi customer service dengan nyaman dan dapat diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu di lokasi-lokasi CS Digital BCA. Nasabah dapat beragam transaksi di CS Digital BCA, antara lain ganti kartu: migrasi ke chip, hilang, rusak, penggantian jenis kartu, lupa PIN, cetak kartu digital ke fisik. Registrasi e-Banking: Mobile Banking (BCA mobile), Klik BCA Individual (KBI), SMS BCA. **(Lmg)**

PROGRAM JAMINAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

Disnakertrans DIY Proaktif Perluas Jangkauan

YOGYA (KR) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY tengah berupaya seoptimal mungkin dan lebih giat lagi dalam mendorong perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Selain itu, pro aktif membantu perluasan jangkauan dari program jaminan perlindungan ketenagakerjaan tersebut yang difokuskan bagi sektor UKM, sektor konstruksi dan sektor lainnya.

Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadhi mengaku tengah berupaya agar perusahaan-perusahaan di DIY mengikutsertakan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mewujudkan upaya tersebut pihaknya pun berupaya meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan perusahaan plat merah tersebut

"Kami berupaya seoptimal mung-

kin mendorong agar mereka lalu taat dan patuh mengikutsertakan pekerjanya masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan saat ini. Kami terus lakukan upaya tersebut melalui pengawasan terpadu tentunya di di DIY," ujarnya kepada KR, Minggu (15/8).

Aria mengaku, perihal data-data perusahaan di DIY yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan bersifat dinamis. Sehingga pihaknya selalu berprogres untuk perluasan kemanfaatan dari program BPJS Ketenagakerjaan tersebut sampai saat ini di DIY.

"Yang perlu saya sampaikan, ti-

dak saja sektor usaha menengah ke atas yang wajib mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi yang sekarang menjadi target perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu menasar pelaku UKM dan usaha bidang konstruksi dan lain-lain," tandasnya.

Terkait jumlah perusahaan yang sudah mendaftarkan karyawannya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan DIY sudah relatif banyak, khususnya perusahaan dengan tenaga kerja banyak. "Perluasan jangkauan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kali ini lebih difokuskan ke sektor-sektor lainnya seperti UMKM, konstruksi dan sektor lainnya agar jumlah kepesertaan semakin banyak. Bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya akan masuk mekanisme pengawasan mulai dari preventif edukatif kemudian represif yudisial maupun represif

non yudisial. Sanksinya akan masuk dalam tahapan-tahapan tersebut," terangnya.

Menurut Aria, dengan keikutsertaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan lebih banyak manfaatnya tidak hanya mendapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai amanat undang-undang yang ada. Utamanya lebih kepada sebagai upaya perlindungan ketenagakerjaan dengan banyak kemanfaatan yang akan diperoleh.

"Pemerintah Pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) telah mengalokasikan BSU bagi pekerja yang menjadi peserta atau perusahaan yang mengikutsertakan pekerja tersebut masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan. Terkait data, proses dan segala sesuatunya pencairan BSU tersebut menjadi kewenangan langsung Pemerintah Pusat," pungkasnya. **(Ira)**

SIAP GELAR JARINGAN DI INDONESIA

XL Axiata Lolos Uji Laik Operasi 5G

JAKARTA (KR) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) lolos Uji Laik Operasi (ULO) untuk menggelar jaringan 5G di Indonesia. Kelolosan ULO 5G tersebut tertuang dalam Surat Keterangan Laik Operasional (SKLO) yang diterima manajemen XL Axiata. Diterimanya SKLO ini sekaligus melengkapi rangkaian perayaan XL Axiata memasuki usia 25 tahun dalam upaya Membangun Indonesia Digital.

Menkominfo Johnny G Plate menyambut baik PT XL Axiata Tbk yang baru saja mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasional (SKLO) layanan 5G pada 6 Agustus 2021, setelah melakukan Uji Laik Operasi (ULO) pada 3-5 Agustus 2021. "Dengan demikian kini layanan komersial 5G



KR-Istimewa

Menkominfo berbincang dengan Presdir XL Axiata.

didukung oleh tiga operator telekomunikasi nasional dan ke depannya," ujarnya.

Menkominfo menambahkan, melalui penerbitan SKLO Layanan 5G tersebut, maka layanan jaringan, serta seluruh sarana dan prasarana 5G yang telah selesai dibangun oleh PT XL Axiata, Tbk, secara teknis dinyatakan siap beroperasi. Layanan jaringan 5G ini akan dilakukan pada pita frekuensi 1800 MHz atau 1,8 GHz, dengan lebar pita 20 MHz dalam rentang 1807,5 MHz sd 1827,5 MHz. Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini mengatakan, XL Axiata mendukung pemerintah dalam melakukan percepatan implemetasi teknologi 5G di Indonesia, selaras dengan spirit untuk terus berinovasi dan selalu adaptif terhadap setiap perkembangan teknologi telekomunikasi secara global. **(Rsv)**

Asuransi Syariah Berpeluang Tumbuh

JAKARTA (KR) - Potensi pasar asuransi nasional khususnya asuransi syariah di Indonesia masih sangat besar dan berpeluang untuk terus tumbuh. Pasalnya Indonesia memiliki 270 juta penduduk dan porsi kelas menengahnya yang cukup besar. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Indonesia KH Ma'ruf Amin dalam acara Seremonial dan Tahniah Milad 18 Tahun Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) yang diselenggarakan secara daring, Sabtu, (14/8).

"Industri asuransi memiliki kontribusi signifikan terhadap Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Berdasar data OJK, sampai Mei 2021 jumlah aset industri asuransi nasional sebesar Rp 1.547 triliun atau 50 persen dari total aset IKNB. Meskipun di tengah krisis, aset industri asuransi tetap tumbuh sebesar 6,07 persen di tahun 2020 dan hingga Mei 2021 tumbuh sebesar 4,15 persen," bebarnya.

Dikatakan, pangsa aset asuransi syariah terhadap aset industri asuransi nasional masih sangat rendah, yaitu baru 2,83 persen dengan jumlah aset sebesar Rp 42,78 triliun per Mei 2021. Porsi ini mengecil dibandingkan per Desember 2019 dengan aset sebesar Rp 45,45 triliun dengan pangsa pasar 3,3 persen. "Hal ini menunjukkan bahwa industri asuransi syariah cukup terdampak pandemi Covid-19. Terutama terlihat dari penurunan yang cukup besar pada asuransi jiwa yakni minus 8,21 persen per Mei 2021 terhadap Desember 2019," jelas Wapres.

Dikatakan, angka penetrasi asuransi syariah terhadap PDB juga masih sangat kecil yakni 0,145% per Mei 2021, masih jauh dari penetrasi industri asuransi nasional sebesar 3,03%. Sementara angka densitas atau premi perkapita asuransi syariah sebesar Rp 83.900 per bulan. Masih lebih kecil jika dibandingkan dengan densitas industri asuransi konvensional yang sebesar Rp 145.000 perbulan. **(Lmg)**